

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JASA TITIP BELI ANTARA PIHAK PENITIP BELI DENGAN PIHAK TITIP JEPANG

Oleh:

Tasya Ghaisani Sequoyah¹, Ninik Darmini²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan perjanjian standar *online* sebagai upaya perlindungan hukum dalam perjanjian jasa titip beli antara Pihak Penitip beli dengan Pihak Titip Jepang dikaitkan dengan asas keseimbangan. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian jasa titip beli antara Pihak Penitip Beli dengan Pihak Titip Jepang dalam hal terjadinya wanprestasi.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder serta penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, perjanjian standar *online* yang diterapkan oleh pihak Titip Jepang belum terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang seimbang sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada para pihak dikaitkan dengan aspek daya kerja asas keseimbangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam hal terjadinya wanprestasi adalah dengan melakukan negosiasi. Hal tersebut dikarenakan menurut Titip Jepang dan pihak Penitip beli, negosiasi merupakan upaya penyelesaian yang paling efektif dalam mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jasa Titip Beli, Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Asas Keseimbangan

¹ Mahasiswa pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE APPLICATION OF THE BALANCE PRINCIPLE IN THE PURCHASE SERVICE AGREEMENT BETWEEN THE PARTY OF THE PURCHASE SERVICE USER AND THE PARTY OF TITIP JEPANG

By:

Tasya Ghaisani Sequoyah³, Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

This legal research is aimed to identify and analyse the existence of an *online* standard agreement as an effort to legal protection in the purchase service agreement between the party of the purchase service agreement and the party of the Titip Jepang associated with the balance principle. This legal research is also aimed to identify and analyse the settlement efforts taken by the parties in the purchase agreement between the party of purchase service user and the party of Titip Jepang when a breach of contract occurs.

The method of approach used in this legal research is a normative-empirical. This research are descriptive in nature. Primary data are gathered by doing interviews and the secondary data are obtained by literature study. Every data in this research is analysed with qualitative method.

The research and study produces 2 (two) conclusions. First, the purchase service standard agreement which applied by the party of Titip Jepang associated with the aspects of the work power of the balance principle and the Consumer Protection Act has not provided optimal legal protection for the parties. Second, the effort taken in regards when a breach of contract occurs is negotiation. This is because negotiation is the most effective settlement effort in getting the best solution for both parties according to the purchase service user and Titip Jepang.

Keyword: Purchase Service Agreement, Consumer Protection, Breach of Contract, The Balance Principle

³ Undergraduate Student of Civil Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer at Civil Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada